DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

TAHUN 2007-2016

Skripsi

Oleh:

Nama	: Tri Kartika Sari
Nomor Mahasiswa	: 14313236
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

TAHUN 2007-2016

Skripsi

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Tri Kartika Sari
Nomor Mahasiswa	: 14313236
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2017

Penulis,

Tri Kartika Sari

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

TAHUN 2007-2016

Nama	: Tri Kartika Sari
Nomor Mahasiswa	: 14313236
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 12 Desember 2017

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Jaka Sriyana, Dr., S.E., M.Si

iv

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2007-2016

Disusun Oleh : **TRI KARTIKA SARI**

Nomor Mahasiswa : **14313236**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 12 Januari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. .....

Penguji : Muhammad Jauharul Maknum, SE., M.E.K .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

"Sesungguhnya disamping kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah usai suatu urusan, kerjakanlah urusan lain. Dan hanya kepada Allah-lah kamu berharap"

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8)

HALAMAN PESEMBAHAN

Karya ini merupakan salah satu bentuk dharma baktiku

Kepada Ayahanda dan Ibundaku tercinta

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran,

dukungan, semangat, dan doa yang selalu dipanjatkan untukku

Terimakasih pula kupersembahkan untuk sahabat-sahabatku

dan seluruh semesta yang mendukungku

Yang tiada pernah hentinya menjadi curahan segala kesah, tempat berbagi tawa

dan semangat dalam menjalani semuanya

"janganlah berganti, tetaplah seperti ini…"

-Sahabat Kecil-

KATA PENGANTAR

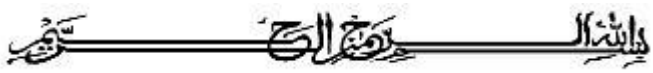

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan syafa'atnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2016".**

Skripsi ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku di lingkungan Jurusan Ilmu Ekonomi dan merupakan salah satu bentuk hasil pemikiran pemecahan permasalahan dalam bidang Ekonomi Regional guna melengkapi perolehan gelar Sarjana jenjang strata 1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun skripsi, penulis menyadari banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun cara menyajikan. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amin.

Sepanjang proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa banyuan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, kemudahan serta ridho, dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap hamba-Nya, dan tidak terkecuali kepada penulis.
2. Nabi besar Muhammad SAW sebagai *uswatuh Hasanah*.
3. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
5. Bapak Akhsyim Affandi, M.A. selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi.
6. Bapak Jaka Sriyana, Dr., S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Seluruh karyawan *staff* tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

9. Orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi Bapak Sariman dan Ibu Murtasiana terimakasih atas do'a, jerih payah, cucuran keringat, dan dukungan yang telah diberikan yang tak mungkin terbalaskan.
10. Kakak saya Dwi Mega Sari yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan amanah ini agar dapat terselesaikan tepat pada waktunya terima kasih banyak.
11. Sahabat dan teman sepermainan yang selalu bersama dan mendukung hingga tahap ini Anandya Agustin, Endah Nor Hikmah, Fadilah Putri Arafah, Indri Larasati, Nastiti Kurniawati, Putri Tunggal Dewi, dan Sofi Yuliana.
12. Semua teman-teman Ilmu Ekonomi 2014 seperjuangan yang telah banyak membantu, berbagi ilmu, saling mendukung, dan menyemangati dalam kegiatan perkuliahan. IE satu IE keluarga IE satu keluarga.

Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu atas perhatian dan curahan ide sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2017

Penulis,

Tri Kartika Sari

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i

HALAMAN JUDUL ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN UJIAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 10
2.1 Kajian Pustaka 10
2.2 Landasan Teori 12
2.2.1 Tenaga Kerja 12
2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja 13
2.2.3 Permintaan Tenaga Kerja 14
2.2.4 Upah 18
2.2.4.1 Upah Minimum 21
2.2.4.2 Upah Minimum Provinsi (UMP) 22
2.2.4.3 Hubungan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 24
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 25
2.2.5.1 Hubungan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 28
2.2.6 Angkatan Kerja 29
2.2.6.1 Hubungan Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .. 30
2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 32
2.2.7.1 Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 34
2.3 Hipotesis Penelitian 35
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1 Definisi Operasional Variabel 36
3.2 Jenis dan Sumber Data 38
3.3 Metode Analisis Data 39

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 46
4.1 Hasil dan Analisis 46
4.1.1 Pemilihan Model 46
4.1.1.1 Uji *Chow* 46
4.1.1.2 Uji *Hausman* 48
4.1.2 Estimasi Model Regresi *Fixed Effect* 49
4.1.3 Uji Hipotesis 52
4.1.3.1 Uji t (Pengujian Hasil Individu) 52
4.1.3.2 Uji F (Uji Secara Menyeluruh) 54
4.1.3.3 Koefisien Determinasi (R^2) 55
4.1.4 Analisis *Cross Section Effect* (Perprovinsi) 55
4.1.5 Analisis *Period Effect* (Pertahun) 56
4.3 Pembahasan 57
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI 60
5.1 Simpulan 60
5.2 Implikasi 62
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha 3

Tabel 1.2 Data Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia 4

Tabel 4.1 Hasil Uji *Chow* 47

Tabel 4.2 Hasil Uji *Hausman* 48

Tabel 4.3 Hasil Estimasi *Fixed Effect* 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja 12

Gambar 2.2 Kurva Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek dan Panjang 18

Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model 44

Gambar 4.1 Grafik Hasil Konstanta *Cross Section Effect* 55

Gambar 4.2 Grafik Hasil Konstanta *Period Effect* 56

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang terpenting pada suatu daerah karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja maka angka pengangguran akan dapat berkurang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2016. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi panel data dengan metode estimasi *Fixed Effect* pada taraf nyata 5 persen. Data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi online BPS berbentuk data sekunder yang terdiri dari variabel terikat yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk bekerja (Agustus) di Indonesia pada tahun 2007-2016, sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto di Indonesia pada tahun 2007-2016. Data diambil dari 33 provinsi di Indonesia. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sedangkan angkatan kerja dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, UMP, IPM, Angkatan Kerja, dan PDRB.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam usaha memajukan perekonomian suatu bangsa. Usaha yang dimaksud yaitu penyediaan lapangan kerja yang cukup agar dapat mengimbangi pertambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Kesempatan kerja, kuantitas, dan kualitas tenaga kerja menjadi indikator yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan, diantaranya: (1) tenaga kerja sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi serta distribusi barang dan jasa, dan (2) tenaga kerja sebagai sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Kedua fungsi tersebut memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dalam jangka panjang sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan (Suroto, 1992). Salah satu tema utama bidang ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain upah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan pendapatan nasional. Apabila faktor-faktor tersebut mengalami perubahan maka akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja. Adanya kesempatan kerja ini dapat memberikan

peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Kesempatan kerja dapat diartikan juga sebagai permintaan terhadap tenaga kerja di pasar tenaga kerja (*demand for labour force*), dimana kesempatan kerja sama dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja. Semakin meningkat kegiatan pembangunan maka akan semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menjadi sangat penting karena semakin besar kesempatan kerja bagi tenaga kerja maka kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin baik, dan sebaliknya. Di sisi lain, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tinggi dalam waktu yang cepat, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas maka akan menyebabkan timbulnya pengangguran. Hal inilah yang membuat permasalahan ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan masalah-masalah lainnya seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan, urbanisasi, instabilitas politik, dan kemiskinan. Semua ini secara intuitif telah dipahami oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang berimplikasi terhadap lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, mengingat semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha (dalam ribu jiwa)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata	Total
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	41.206	41.331	41.611	41.494	39.088	39.590	39.220	38.973	37.748	37.770	39.803	398.031
2	Pertambangan dan Penggalian	994	1.070	1.155	1.254	1.435	1.602	1.426	1.436	1.320	1.476	1.317	13.168
3	Industri	12.368	12.549	12.839	13.824	14.542	15.615	14.959	15.254	15.255	15.540	14.275	142.745
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	174	201	223	234	234	251	252	289	288	357	250	2.503
5	Konstruksi	5.252	5.438	5.486	5.592	6.264	6.851	6.349	7.280	8.208	7.978	6.470	64.698
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	20.554	21.221	21.947	22.492	22.298	23.517	24.105	24.829	25.686	26.689	23.334	233.338
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.958	6.179	6.117	5.619	5.006	5.052	5.096	5.113	5.106	5.608	5.485	54.854
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.399	1.459	1.486	1.739	2.578	2.696	2.898	3.031	3.266	3.531	2.408	24.083
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	12.019	13.099	14.001	15.956	15.971	17.328	18.451	18.420	17.938	19.459	16.264	162.642
Total		**99.924**	**102.547**	**104.865**	**108.204**	**107.416**	**112.502**	**112.756**	**114.625**	**114.815**	**118.408**	**109.606**	**1.096.062**

Sumber: BPS (2007-2016)

Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di berbagai lapangan usaha. Berdasarkan pada data dalam Tabel 1.1, terlihat bahwa sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Dalam periode tahun tersebut rata-rata pekerja yang terserap di sektor ini sebesar 39,8 juta orang. Sektor penyerap tenaga kerja tebesar kedua adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yang menyerap tenaga kerja rata-rata

sebesar 23,33 juta orang. Sedangkan rata-rata tenaga kerja yang terserap di sektor jasa-jasa sebesar 16,26 juta orang. Rata-rata penyerapan tenaga kerja terendah berada pada sektor listrik, gas, dan air minum yaitu sebesar 250 ribu orang. Dalam periode tersebut penyerapan tenaga kerja senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. Adanya ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja akan menimbulkan *gap* yang disebut pengangguran. Pengangguran ini pada akhirnya akan membawa dampak ketidakstabilan ekonomi yang akan berimbas pada ketidakstabilan di bidang kehidupan lainnya. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia (dalam juta jiwa)

Jenis Kegiatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Usia Kerja	164,19	166,64	169,33	172,07	173,85	176,87	179,97	182,99	186,10	189,10
Angkatan Kerja	109,94	111,95	113,83	116,53	116,10	119,85	120,17	121,87	122,38	125,44
Penduduk Bekerja	99,93	102,55	104,87	108,21	107,42	112,50	112,76	114,63	114,82	118,41
Pengangguran Terbuka (%)	10,01	9,39	8,96	8,32	8,68	7,34	7,41	7,24	7,56	7,03
Kesempatan Kerja	90,89	91,61	92,13	92,86	92,52	93,87	93,83	94,06	93,82	94,39

Sumber: BPS (2007-2016)

Tercatat pada tahun 2016 terdapat 189,10 juta jiwa penduduk yang berada pada usia kerja. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun yang sama sebanyak 118,41 juta jiwa. Data jumlah penduduk yang bekerja ini pun masih termasuk mereka yang bekerja pada usia di luar

usia kerja (15 tahun ke bawah). Tingkat pengangguran terbuka yang terjadi pada tahun ini sebesar 7,03% dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 94,39 juta jiwa.

Dari Tabel 1.2 dapat diperhatikan bahwa dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2007-2016 penduduk usia kerja dan angkatan kerja selalu mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah kesempatan kerja yang tersedia selalu berada di bawahnya bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Tampak bahwa penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tersebut masih tergolong rendah. Kondisi ini yang akan menciptakan *gap* antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia sehingga pengangguran senantiasa ada sehingga menjadi masalah yang harus dicari pemecahannya untuk diminimalisir jumlahnya setiap tahun.

Berdasarkan fakta dan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2016".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Selain itu diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam hal penyerapan tenaga kerja di Indonesia terutama permasalahan pengangguran di Indonesia.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan, memperluas, dan memantapkan wawasan serta keterampilan yang dapat membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang masing-masing dijelaskan secara singkat.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

   Berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-peneltian yang pernah dilakukan sebelumnya pada topik yang sama. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki arti penting sehingga diketahui kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun empiris.

2. Landasan Teori

   Berisi tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini harus memberikan diskusi yang lengkap mengenai hubungan antar variabel yang terlibat.

3. Hipotesis Penelitian

   Dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang deskripsi data penelitian dan menyajikan hasil analisis serta pembahasannya.

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini memaparkan tentang simpulan dari seluruh pelaksanaan penelitian dan implikasi untuk memberikan rekomendasi tindakan nyata dalam memecahkan masalah penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian terkait analisis pengaruh PDRB, tingkat upah riil, dan investasi riil terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, dimana metode penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, tingkat upah riil berpengaruh negarif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dimana dengan adanya peningkatan tingkat upah maka akan menjadi beban bagi pengusaha dan mengecilkan proporsi keuntungan, sedangkan investasi riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga di DKI Jakarta dimana hasil tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada. Penyebab hubungan negatif antara investasi dan penyerapan tenaga kerja disebabkan karena pilihan pengusaha yang lebih banyak terhadap penggunaan modal dan adanya faktor struktural, kelembagaan, dan politik yang dapat mengubah harga pasaran tenaga kerja (Dimas, 2009).

Penelitian terkait analisis pengaruh upah minimum provinsi dan kesejahteraan masyarakat terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia, dimana metode penelitian ini menggunakan regresi panel data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dimana ketika terjadi kenaikan upah maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja yang mempunyai produktifitas yang rendah. Sedangkan kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia (Sulistiawati, 2012).

Penelitian terkait analisis pengaruh upah minimum, PDRB, angkatan kerja, dan investasi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember, dimana metode penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) dengan data runtut waktu (*time series*) mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2007. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember, sedangkan PDRB, angkatan kerja, dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember (Utami, 2009).

Penelitian terkait analisis pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, dimana metode penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) dengan data runtut waktu (*time series*) mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, PDRB, dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan secara parsial, PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif

dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali (Indradewa, 2013).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1985), tenaga kerja merupakan penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan sedang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Adapun gambar komposisi penduduk dan tenaga kerja secara rinci sebagai berikut:

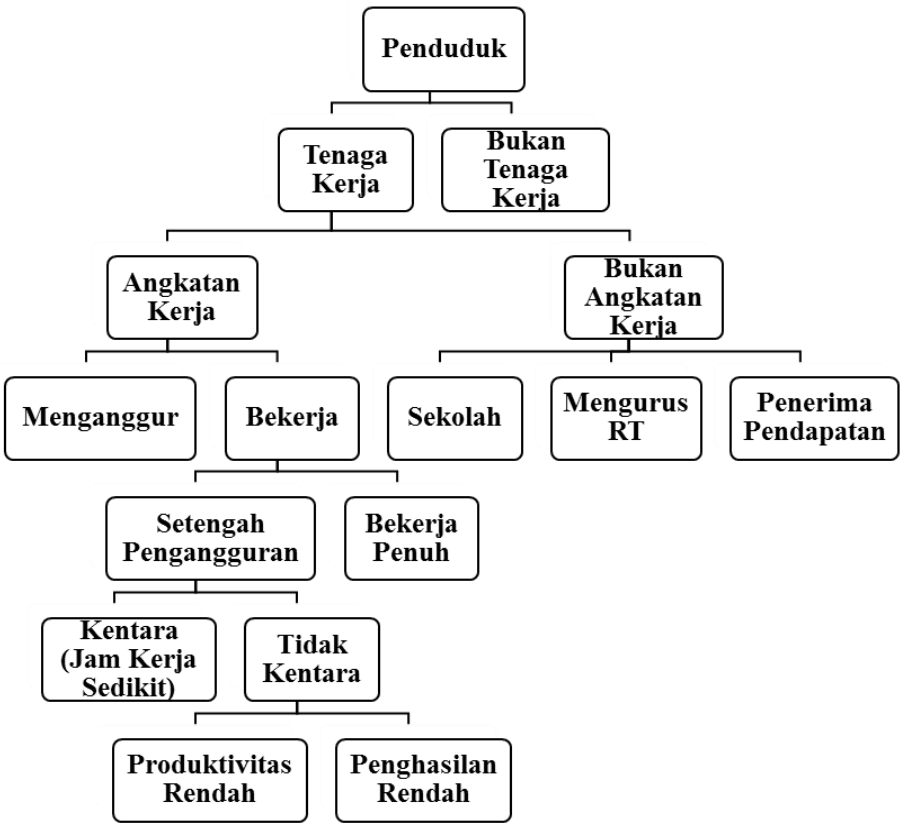

Sumber: Simanjuntak (1985)

Gambar 2.1 Komposisi Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan gambar 2.1 tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara waktu tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan.
2. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau usia kerja dengan kegiatan sekolah, menggurus rumah tangga dan lainnya.

2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah berbagai jumlah tenaga kerja yang mampu diserap atau dibutuhkan oleh suatu unit atau perusahaan. Tenaga kerja yang diserap ini khususnya yang mempunyai kemampuan atau keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka mampu diserap oleh suatu unit tertentu yang membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang telah bekerja dan terserap diberbagai unit perekonomian yang tentunya akan menghasilkan barang atau jasa dengan jumlah yang besar. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi tersebut akan menimbulkan perbedaan pada produktivitas bahkan kontribusi bagi pendapatan nasional.

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai kemampuan lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja tersebut. Jumlah penyerapan tenaga kerja dapat sama atau bahkan lebih kecil jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Apabila jumlah kesempatan kerja sama dengan jumlah penyerapan kerja maka tidak akan terjadi pengangguran. Namun, apabila jumlah penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran (Feriyanto, 2014).

2.2.3 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja. Dimana tingkat upah ditetapkan sendiri oleh perusahaan tempat bekerja dan kuantitas tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Untuk dapat memahami permintaan tenaga kerja dengan baik maka dapat digunakan fungsi produksi.

Fungsi produksi:

$$Q = f(K,L)$$

Dimana: K → capital atau modal

L → labor atau tenaga kerja

Sebuah perusahaan pasti menggunakan faktor input yaitu modal (K) dan tenaga kerja (L) di dalam proses produksinya.

Secara khusus, suatu kurva permintaan dapat menggambarkan jumlah maksimum yang dikehendaki seorang pembeli untuk membelinya dalam tingkat harga dan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal tenaga kerja, kurva permintaan menggambarkan jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam harga dan jangka waktu tertentu.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja:

1. Perubahan tingkat upah

   Apabila tingkat upah naik cenderung perusahaan akan menggantikannya dengan teknologi dalam proses produksinya daripada harus menambah tenaga kerja lagi. Hal ini dikarenakan apabila tingkat upah naik secara tidak langsung biaya produksi perusahaan akan semakin tinggi sehingga konsumen akan mengurangi barang yang akan dikonsumsi. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat upah turun perusahaan cenderung akan menambah jumlah tenaga kerja dalam proses produksinya. Apabila tingkat upah turun maka biaya produksinya akan turun juga sehingga konsumen akan menambah barang yang akan dikonsumsinya.

2. Perubahan permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan

   Apabila permintaan konsumen akan hasil produksi suatu perusahaan meningkat, maka perusahaan tersebut cenderung akan menambah juga kapasitas produksi yang dihasilkan. Hal ini mempunyai maksud agar perusahaan tersebut untuk menambah penggunaan tenaga kerja.

3. Harga barang modal turun

   Apabila harga modal turun, maka biaya yang digunakan untuk produksi akan turun dan tentunya berdampak juga pada harga jual barang per unitnya yang akan mengalami penurunan juga. Sehingga pada kondisi seperti ini, perusahaan cenderung untuk meningkatkan jumlah produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar. Disamping itu permintaan pada tenaga kerja juga dapat bertambah besar karena terjadinya peningkatan kegiatan purusahaan.

Permintaan tenaga kerja dibagi menjadi 2 jangka waktu yaitu permintaan secara jangka pendek dan permintaan secara jangka panjang. Pada permintaan jangka pendek menggambarkan bahwa perusahaan menerima tingkat upah yang diberikan dan harga jual produk. Dalam hal ini pengusaha tidak dapat merubah penggunaan jumah modal, yang dapat dirubah hanyalah penggunaan tenaga kerja dalam upaya untuk meningkatkan output yang akan diproduksi. Untuk

mengetahui jumlah tenaga yang akan diminta maka digunakan skedul VMPP (*value marginal physical product*), dimana VMPP merupakan kurva permintaan suatu perusahaan karena telah menentukan harga maksimum yang akan dibayarkan oleh perusahaan untuk berbagai jumlah tenaga kerja. Setiap perusahaan diasumsikan akan memaksimalkan keuntungan dan mau tidak mau akan dengan sengaja membayar setiap input lebih daripada input yang ditambahkan kepada penerimaan perusahaan keseluruhan. Nilai VMPP didapat dari MPP (*marginal physical product*) dikalikan dengan P atau tingkat harga (Bellante, 1990).

Permintaan jangka panjang menggambarkan adanya kebebasan dalam perusahaan untuk melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja dalam melakukan perubahan pada input lainnya seperti modal. Perusahaan dapat menentukan sendiri perpaduan yang sesuai antara modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan tingkat produksi yang maksimum. Dalam menentukan perpaduan antara modal dan tenaga kerja dalam permintaan jangka panjang dapat digunakan budget line dan kurva isocost.

Pada gambar 2.2 ditunjukkan saat terjadi kenaikan pada upah tenaga kerja dari W_1 ke W_2 dalam jangka pendek perusahaan akan mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja dari L_1 ke L. Namun reaksi lebih responsif akan dilakukan oleh perusahaan saat terjadi permintaan tenaga kerja jangka panjang (D_{LR}) yaitu dengan mengurangi

penggunaan tenaga kerja dari L_1 menjadi L_2 dimana jumlah L_2 lebih kecil dari L lebih kecil dari L_1. Penurunan pada penggunaan jumlah tenaga kerja tersebut kemudian dapat disubstitusikan dengan adanya kenaikan modal yang digunakan.

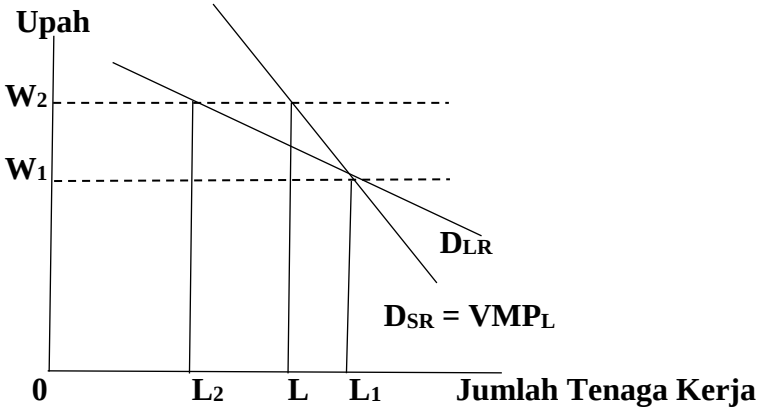

Sumber: Feriyanto (2014)

Gambar 2.2 Kurva Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dalam permintaan tenaga kerja jangka pendek ($D_{SR} = VMP_L$) dan jangka panjang (D_{LR}) memiliki kesamaan yaitu terdapat hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dengan perubahan jumlah tenaga kerja yang digunakan (Bellante, 1990).

2.2.4 Upah

Upah merupakan suatu rangsangun penting yang diberikan oleh suatu perusahaan bagi karyawan. Hal ini tidaklah penting apabila tingkat upah yang menjadi pendorong utama, tingkat upah hanya menjadi dorongan utama bagi tenaga kerja sehingga apabila pada tarif

dimana upah tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup para karyawan.

Menurut Dewan Pengupahan Nasional mendefinisikan upah sebagai suatu penerimaan setelah bekerja yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan pruduksi yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sedangkan menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2000 pasal ayat 30, mengemukakan bahwa upah adalah hak bagi para pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan karena telah mengeluarkan jasa yang dilakukan bagi perusahaan yang ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Ada 3 teori upah, yaitu:

1. Teori Upah Alami (Wajar)

   Menurut David Ricardo, upah wajar merupakan upah yang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Apabila upah rata-rata terlalu tinggi, barang yang dihasilkan akan berharga tinggi dan dapat berakibat tidak laku dijual dan akhirnya perusahaan tidak akan mampu untuk bertahan. Begitu juga sebaliknya, apabila upah rata-rata terlalu

rendah berarti membiarkan pekerja hidup miskin atau tidak wajar.

2. Teori Upah Besi

   Menurut Ferdinand Lassale, upah besi merupakan upah pada tenaga kerja yang berdasarkan atas hukum permintaan dan penawaran di pasar yang akan menekan ke bawah. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan selalu ingin mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Apabila dilihat dari sisi penawaran, pada posisi pekerja dapat dikatakan berada pada pihak yang lemah karena sifat pada tenaga kerja berbeda dengan sifat yang diperjualbelikan. Upah besi ini ternyata bagi pihak pekerja adalah hukum yang sukar ditembus. Oleh karena itu pihak pekerja dengan terpaksa menerima ketentuan upah yang rendah sehingga hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup yang pas-pasan. Menurut Lassale, untuk menghadapi hukum upah besi tersebut, para pihak perkerja seharusnya membentuk serikat pekerja demi memperjuangkan kepentingan bersamanya.

3. Teori Etika

   Dalam hukum etika ini, pembayaran upah yang hanya cukup digunakan untuk kebutuhan hidup yang minimum bagi para pekerjanya menupakan hal yang tidak etis. Upah yang ideal diharuskan dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, para pekerja

selain mendapatkan upah juga harus mendapatkan tunjangan hidupnya.

Sebenarnya yang diharapkan oleh pekerja bukan semata-mata mendapatkan upah yang tinggi, melainkan seberapa banyak barang yang mampu untuk dibeli dengan upah yang diterima. Dalam hal ini, Sukirno (1997) membedakan upah menjadi 2, yaitu:

1. Upah nominal adalah jumlah uang yang diterima oleh para pekerja dan pengusaha atas dasar pembayaran tenaga kerja mental dan fisik yang telah digunakan dalam proses produksi.
2. Upah riil yaitu tingkat upah para pekerja yang diukur dari kemampuan upah tersebut dalam membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja.

2.2.4.1 Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang dipakai oleh pelaku industri atau pengusaha untuk dibayarkan kepada para pekerja dilingkungan kerjanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1999, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok yang termasuk tunjangan tetap. Upah ini hanya berlaku bagi yang masih lajang dan sudah punya pengalaman bekerja selama 0-1 tahun yang berfungsi untuk jaring pengaman yang ditetapkan

melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun. Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya uoah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak ditengah adanya gejolak perekonomian yang terjadi saat ini. Adanya kebijakan upah minimum tersebut juga diambil untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produsi guna meningkatkan keuntungan perusahaan.

2.2.4.2 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 maka upah pekerja disebut dengan istilah UMR atau UMP. UMP dapat diartikan sebagai suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya sesuai dengan ketentuan provinsi tempat perusahaan itu berada.

Penetapan upah minimum provinsi ini dilakukan setiap tahun melalui beberapa proses dan koordinasi. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha mengadakan rapat yang kemudian akan membentuk tim survey dan akan turun ke lapangan untuk mencari tau harga beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan, dan buruh. Kemudian setelah disurvei di berbagai kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, akan diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan KHL, Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan nilai upah minimum provinsi yang telah dirundingkan sebelumnya kepada Gubernur untuk selanjutnya disahkan. Penetapan upah minimum provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari. Komponen untuk kebutuhan hidup secara layak digunakan sebagai upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja yang masih lajang atau belum menikah. Terdapat 3 komponen dalam upah, yaitu gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

2.2.4.3 Hubungan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah yang dibayarkan kepada karyawan merupakan upah yang sudah dihitung berdasarkan tambahan output dengan penambahan karyawannya. Kenaikan tingkat upah akan mempengaruhi jumlah biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah terutama biaya produksi, ada beberapa hal yang akan terjadi apabila tingkat upah naik (Sumarsono, 2009):

1. Pada saat tingkat upah naik maka akan berdampak ada biaya produksi yang meningkat, yang selanjutnya harga barang per unitnya juga akan naik. Biasanya konsumen akan memberikan respon yang cepat saat adanya kenaikan harga barang sehingga para konsumen akan mengurangi barang yang dikonsumsi atau bisa jadi konsumen tidak akan membeli barang tersebut, sehingga dampaknya bagi perusahaan yaitu banyak produk yang tidak terjual dan dengan terpaksa untuk mengurangi jumlah barang produksinya. Dalam keadaan ini dimana jumlah produksi yang berkurung, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya penurunan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan diakibatkan oleh penurunan skala produksi yang disebut sebagai *scale effect* atau efek skala produksi.

2. Pada saat tingkat upah naik terdapat beberapa pengusaha yang memilh untuk lebih banyak menggunakan teknologi dari pada tenaga kerja manusia dan menggantikan dengan kebutuhannya seperti beralih pada mesin dan lain sebagainya untuk proses produksinya.

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbesar pilihan-pilihan yang ada bagi manusia, dimana dalam indeks pembangunan manusia ada tiga indikator yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah, angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun keatas dan standar hidup yang dihitung dari daya beli masyarakat. Pengertian indeks pembangunan munusia menurut UNDP (*United Nations Development Program*) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan perkembangan manusia. Adapun angka dari IPM ini berkisar antara 0-100 atau 0-1, semakin mendekati 100 atau angka 1 maka pembangunan manusia pada suatu negara atau daerah akan semakin baik. Rumus penghitungan lPM adalah sebagai berikut:

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)

Keterangan:

X1 = Indeks harapan hidup

X2 = Indeks pendidikan

X3 = Indeks standar hidup layak

Konsep pembangunan manusia merupakan salah satu konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup bagi manusia itu sendiri, dimana peningkatan kualitas hidup tersebut berlangsung baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Pembangunan ekonomi sendiri menitikberatkan pada pembangunan manusia seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualiatas dari sumber daya manusia tentunya akan membuka peluang lebar bagi penduduk untuk dapat berpatisipasi dalam proses pembangunan berkelanjutan terutama dalam peningkatan kesempatan kerja.

Pembentukan modal manusia merupakan suatu proses untuk meningkatkan dan memporoleh kualitas manusia dari sisi pendidikan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu negara. Adanya pembentukan modal manusia ini terkait langsung dengan investasi modal manusia. Investasi di bidang sumber daya manusia merupakan pengorbanan sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi, investasi modal manusia ini sering disebut sebagai *human capital* yang penerapannya dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu pendidikan dan latihan, migrasi dan gizi, dan kesehatan.

Pendidikan dan latihan bukan hanya akan meningkatakan pengetahuan namun juga bisa meningkatkan keterampilan kerja yang dapat meningkatakan pula produktifitas kerja. Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sumarsono, 2009).

Pendidikan terkait langsung dengan peningkatan produktifitas. Tingginya produktifitas output disuatu negara akan meningkatkan GDP sehingga menstimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja masyarakat. Selain itu perbaikan status gizi yang dilakukan di sektor kesehatan akan menurunkaan kesakitan sehingga dapat meningkatakan partisipasi angkatan kerja dan meningkatkan kinerja dari tenaga kerja. Sejumlah tenaga kerja yang tidak bermutu tentunya akan menghasilkan output yang rendah dan ikut memakan output yang tidak mereka hasilkan (Subri, 2003). Hasilnya bahwa pendapatan perkapita akan mengalami penurunan karena mutu tenaga kerja yang dilihat salah satunya dengan pendidikan menjadi salah satu penyebab penurunan produktifitas output yang tentunya berakibat pada penurunan kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja.

2.2.5.1 Hubungan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah, mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap jumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkaikan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan

bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan, dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan dan konsumsinya.

2.2.6 Angkatan Kerja

Angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Oleh karena itu, angkatan kerja dapat diartikan sebagai penduduk yang sudah memasuki usia kerja (berusia 15-65 tahun), baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

Adapun faktor-faktor yang menentukan angkatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan sebaran usia penduduk, penduduk yang berusia lebih dari batas tertentu dianggap masuk ke dalam usia kerja. Misalnya, seseorang anak berusia 10 tahun aktif bekerja dapat dikatakan sebagai bagian dari angkatan kerja.

2. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk di usia muda. Misalnya, penduduk usia muda yang masih sekolah tidak dianggap sebagai angkatan kerja walaupun penduduk usia muda tersebut sebagian orang yang sudah mulai bekerja.
3. Peranan kaum wanita dalam perekonomian, wanita yang bekerja dalam urusan rumah tangga tidak dianggap sebagai angkatan kerja. Jika seorang wanita mempunyai pekerjaan tertentu di luar rumah, maka dimasukkan sebagai angkatan kerja.
4. Pertambahan penduduk yang tinggi, setiap pertambahan jumlah penduduk cenderung akan menambah bagian penduduk yang tergolong angkatan kerja.
5. Meningkatnya jaminan kesehatan, dengan meningkatnya jaminan kesehatan maka umur rata-rata penduduk bertambah. Dimana umur rata-rata akan memperpanjang masa produktif setiap penduduk dalam melakukan pekerjaannya sehingga otomatis akan menambah jumlah angkatan kerja.

2.2.6.1 Hubungan Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Ukuran besar kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi pula oleh struktur berdasarkan jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat

pendidikan. Makin banyak komposisi jumlah tenaga kerja laki-laki dalam suatu negara maka semakin tinggi juga angkatan kerja di negara tersebut. Sementara, usia penduduk berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin banyak jumlah usia yang produktif maka semakin tinggi pula tingkat angkatan kerjanya. Semakin rendah tingkat pendidikan penduduk suatu negara maka akan semakin rendah pula angkatan kerjanya, karena itu tingkat pendidikan merupakan salah satu syarat untuk memasuki dunia kerja.

Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan mampu meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Penyerapan tenaga kerja merupakan gambaran ketersediaannya lapangan pekerjaan di masyarakat. Jumlah penduduk di Indonesia yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi justru akan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi.

Masalah angkatan kerja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan dengan beberapa program dari pemerintah salah satunya program KB, wajib belajar 9 tahun, dan pemberdayaan angkatan kerja dengan cara mengirimkan angkatan kerja dari daerah yang kelebihan ke daerah yang

kekurangan atau membutuhkan tenaga kerja. Banyak cara untuk menangani angkatan kerja yang setiap tahun terus meningkat namun lapangan pekerjaan yang sedikit, itu tergantung dari pemerintah sendiri memprogramkan angkatan kerja menjadi baik atau sebaliknya. Jadi, ketika angkatan kerja yang dihasilkan baik maka penyerapan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat.

2.2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk memberi gambaran tentang keadaan suatu perekonomian di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang terdapat di suatu wilayah. Pada suatu daerah besarnya nilai PDRB dapat digunakan untuk melihat potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Menurut (Tarigan, 2008) ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB:

1. PDRB menurut Pendekatan Produksi

   Dalam pendekatan ini pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah

tersebut kemudian dikurangi dengan biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara produksi dan nilai biaya.

2. PDRB menurut Pendekatan Pendapatan

   Dalam pendekatan ini pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa yang diterima dari faktor produksi, yaitu upah, gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung, dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung. Surplus usaha diantaranya meliputi, bunga yang dibayaukan neto, sewa tanah, dan keuntungan.

3. PDRB menurut Pendekatan Pengeluaran

   Dalam pendekatan ini pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang telah diproduksi di dalam negeri. Apabila dilihat dari sisi penggunaan maka total produksi barang dan jasa dapat digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi) perubahan stok, dari ekspor neto.

2.2.7.1 Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan indikator yang sering dipakai untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara, sedangkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kinerja ekonomi dalam suatu tempat atau suatu negara. PDRB itu sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan dari nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai macam aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam suatu wilayah, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang wilayah tersebut miliki. Disebut domestik karena dalam hal ini berhubungan dengan batasan wilayah dan disebut bruto karena dalam perhitungan ini memasukkan komponen penyusutan. PDRB secara umum dapat disebut juga sebagai agregat ekonomi dimana angka besaran total yang menunjukkan besarnya ekonomi suatu wilayah. Kemudian dari agregat ekonomi ini dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memerlukan tambahan tenaga kerja sebagai faktor produksi guna memenuhi permintaan agregat yang meningkat. Dalam kondisi seperti ini akan terjadi pada struktur perekonomian yang bersifat padat karya (*labour intensive*). Hal ini yang akan menyebabkan

terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena dengan tersedianya lowongan pekerjaan maka akan mengurangi pengangguran. Dengan kata lain, tenaga kerja yang semakin banyak diserap oleh perusahaan akan menciptakan kesejahteraan penduduk (Arsyad, 1997).

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga upah minimum provinsi secara parsial signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum provinsi akan menurunkan penyerapan tenaga kerja.
2. Diduga indeks pembangunan manusia secara parsial signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan indeks pembangunan manusia akan menaikkan penyerapan tenaga kerja.
3. Diduga angkatan kerja secara parsial signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan angkatan kerja akan menaikkan penyerapan tenaga kerja.
4. Diduga produk domestik regional bruto secara parsial signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan produk domestik regional bruto akan menaikkan penyerapan tenaga kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)
    a. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

       Penyerapan Tenaga Kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Satuan yang digunakan jiwa. Data penyerapan tenaga kerja diperoleh dari publikasi online BPS yaitu data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk bekerja (Agustus) di Indonesia dari tahun 2007-2016.
2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)
    a. Upah Minimum Provinsi (X1)

       Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia. Satuan yang digunakan rupiah. Data upah minimum provinsi diperoleh dari publikasi online BPS dari tahun 2007-2016.
    b. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

       Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di masing-masing provinsi di Indonesia. Satuan yang

digunakan persen. Data upah minimum provinsi diperoleh dari publikasi online BPS dari tahun 2007-2016.

c. Angkatan Kerja (X3)

Angkatan Kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Satuan yang digunakan jiwa. Data upah minimum provinsi diperoleh dari publikasi online BPS dari tahun 2007-2016.

d. Produk Domestik Regional Bruto (X4)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di masing-masing provinsi di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun. PDRB dalam penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan harga konstan. Satuan yang digunakan milyar rupiah. Data PDRB berdasarkan harga konstan diperoleh dari publikasi online BPS dari tahun 2007-2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa data panel, yaitu data gabungan yang terdiri dari dua bagian:

1. Deret waktu (*Time series*)

   Data *time series* yang digunakan adalah data tahunan selama sepuluh tahun yaitu tahun 2007-2016.

2. Kerat lintang (*Cross section*)

   Data *cross section* yang digunakan sebanyak tiga puluh tiga yang menunjukkan jumlah provinsi di Indonesia yang diteliti.

Tiga puluh tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D I Y, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Adapun variabel-variabel ekonomi yang digunakan adalah Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum Provinsi (UPM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sumber data diperoleh dari media terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun media yang dimaksud adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan regresi panel data. Data panel (*pooled data*) atau disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu, sedangkan data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu.

Banyak alasan mengapa penggunaan data panel lebih baik pada model-model regresi dibandingkan data *time series* atau *crosss section*, di antaranya menurut Baltagi (2008) adalah:

1. Bila data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, daerah, dan lain-lain pada waktu tertentu, maka data tersebut heterogen. Teknik penaksiran data panel yang heterogen secara eksplisit dapat dipertimbangkan dalam perhitungan.
2. Kombinasi data *time series* dan *cross section* memberikan informasi lebih lengkap, beragam, kurang berkorelasi antar variabel, derajat bebas lebih besar dan lebih efisien.
3. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan studi berulang-berulang dari *cross section*.

4. Data panel lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data *time series* atau *cross section*.
5. Data panel membantu untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atas perusahaan karena unit data lebih banyak.

Adapun persamaan umum estimasi data panel adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y_{it} = \beta_0 + \beta_k X_{1it} + e_{it} \; ; \; i = 1, 2, \ldots, n \; ; \; t = 1, 2, \ldots, t}$$

Dimana:

n : Banyaknya observasi

t : Banyaknya waktu

n x t : Banyaknya data panel

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja). Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda panel data. Berikut persamaan estimasi penelitian ini:

$$\mathbf{PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 AK_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + e_{it}}$$

Keterangan:

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

t : Tahun yang diteliti 2007-2016

i : Provinsi

β_0 : intersept (konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien regresi masing-masing variabel

UMP : Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

AK : Angkatan Kerja (Jiwa)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)

e : error

Guna mencapai tujuan penelitian, analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui model ekonometrika dengan bantuan program Eviews 9.5, adapun tahap-tahap analisis adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

a. Metode Estimasi Data Panel

1. *Pooled Least Square (Common Effect)*

   Metode pendekatan paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data berbentuk pool dengan menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Metode ini mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu (intersep dan slope dianggap sama/konstan).

2. *Fixed Effect*

   Metode pendekatan efek tetap (*fixed effect model*) merupakan model yang mengasumsikan koefisien *slope* konstan tetapi *intercept* bervariasi antar individu.

3. *Random Effect*

Dalam model efek acak (*random effect model*), parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Setiap individu memiliki keragaman konstanta dan berlaku bagi pengamatan di dalam individu tersebut.

b. Pemilihan Metode

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih metode estimasi terbaik antara metode *common effect* atau *fixed effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Chow* dengan probabilitas 0.05. Adapun hipotesis yang digunakan dalm uji *Chow* sebagai berikut:

Ho: *Common Effect*

Ha: *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai probabilitas untuk *cross-section* F pada uji regresi dengan pendekaan *fixed effect* lebih dari 0.05 (tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$) maka Ho diterima sehingga model yang terpilih adalah *pooled least square*, tetapi jika nilainya kurang dari 0.05 maka Ho ditolak sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*.

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* dilakukan untuk menentukan model estimasi yang lebih tepat digunakan antara model *fixed effect* dan *random effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Hausman* dengan probabilitas 0.05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji *Hausman* adalah sebagai berikut:

Ho: *Random Effect*

Ha: *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai untuk probabilitas lebih besar dari 0.05 (tingkat signifikansi atau α = 5%) maka Ho diterima sehingga model yang terpilih adalah *random effect*, tetapi jika nilainya kurang dari 0.05 maka Ho ditolak sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Berikut secara ringkas penjelasan tersebut dapat disederhanakan dalam bagan di bawah ini:

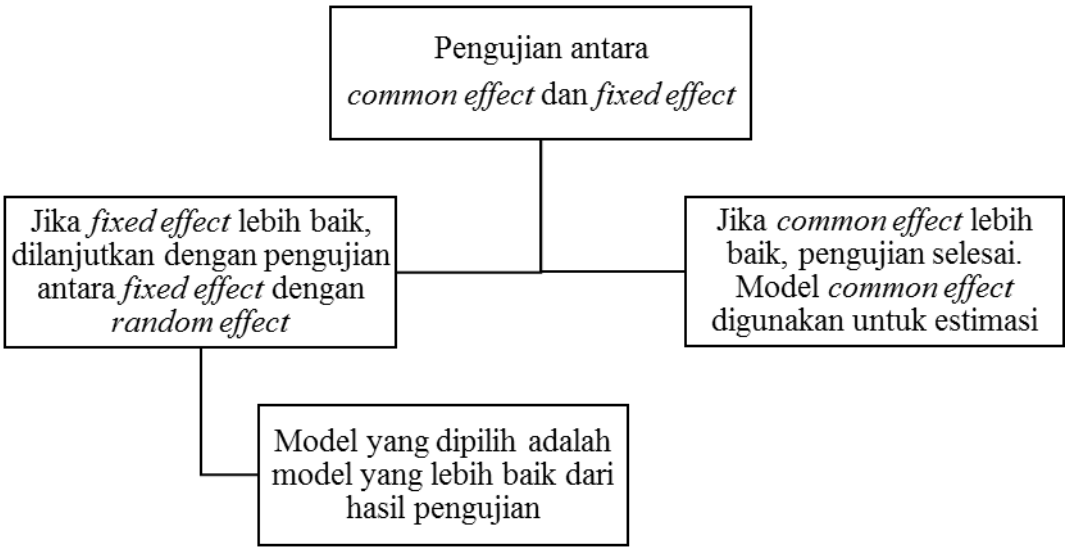

Sumber: Sriyana (2014)

Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model

2. Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, akan dilakukan beberapa uji antara lain uji koefisien regresi secara individual (uji-t), uji koefisien regresi secara keseluruhan (uji-F), uji koefisien determinasi (R^2).

a. Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Individual)

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansinya. Apabila nilai Prob < α maka koefisien variabel tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t

pada derajat keyakinan 95% atau α = 5% dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai probability t-statistik < 0.05 maka Ho ditolak

Jika nilai probability t-statistik > 0.05 maka Ha ditolak

b. Uji F (Koefisien Regresi Secara Keseluruhan)

Uji F (Uji simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat Prob (F-statistic). Apabila nilai Prob (F-statistic) < 0.05 (α = 0.05) maka koefisien regresi secara keseluruhan signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variabel terikat yang dihitung. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas atau kecil. Nilai R^2 yang besar mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada analisis dan pembahasan ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai pengaruh dari upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2016. Dalam penelitian ini analisis dilakukan pada sejumlah data *time series* dan data *cross section* yaitu sebanyak 33 sampel dari sejumlah provinsi di Indonesia pada periode tahun 2007-2016. Analisis data panel dilakukan dengan melakukan pemilihan metode yang tepat dalam menganalisis data-data hasil penelitian, metode tersebut yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Diantara ketiga metode analisis data panel tersebut akan dipilih salah satu metode yang selanjutnya akan digunakan untuk tahap uji statistik. Dalam pengujian estimasi ini digunakan bantuan dengan program Eviews 9.5.

4.1 Hasil dan Analisis

4.1.1 Pemilihan Model

4.1.1.1 Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih metode estimasi terbaik antara metode *common effect* atau *fixed effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Chow* dengan probabilitas 0.05. Adapun hipotesis yang digunakan dalm uji *Chow* sebagai berikut:

Ho: *Common Effect*

Ha: *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai probabilitas untuk *cross-section* F pada uji regresi dengan pendekaan *fixed effect* lebih dari 0.05 (tingkat signifikansi atau α = 5%) maka Ho diterima sehingga model yang terpilih adalah *pooled least square*. tetapi jika nilainya kurang dari 0.05 maka Ho ditolak sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 4.1

Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	131.465276	(32.293)	0.0000
Cross-section Chi-square	901.439670	32	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian uji *Chow* pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0.0000 lebih kecil dari signifikansi sebesar 0.05 (0.0000 < 0.05) sehingga Ho ditolak. Artinya dalam penelitian ini model estimasi *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *pooled least square*. Setelah mengetahui bahwa metode *fixed effect* lebih baik daripada metode *common effect* selanjutnya perlu dilakukan uji *Hausman*.

4.1.1.2 Uji *Hausman*

Metode pemilihan estimasi selanjutnya yang digunakan adalah uji *Hausman*. Uji *Hausman* dilakukan untuk menentukan model estimasi yang lebih tepat digunakan antara model *fixed effect* dan *random effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Hausman* dengan probabilitas 0.05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji *Hausman* adalah sebagai berikut:

Ho: *Random Effect*

Ha: *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan. jika nilai untuk probabilitas lebih besar dari 0.05 (tingkat signifikansi atau α = 5%) maka Ho diterima sehingga model yang terpilih adalah *random effect*, tetapi jika nilainya kurang dari 0.05 maka Ho ditolak sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 4.2

Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: PANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	157.386560	4	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian uji *Hausman* pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang nilainya lebih kecil dari 0.05 sehingga Ho ditolak. Artinya dalam penelitian ini model estimasi yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect* daripada *random effect*. Berdasarkan hasil uji *Chow* dan uji *Hausman* maka metode yang paling tepat digunakan dalam model penelitian ini adalah metode *fixed effect.*

4.1.2 Estimasi Model Regresi *Fixed Effect*

Estimasi model regresi menggunakan data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh dari upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja. Setelah melakukan pemilihan model terbaik maka diperoleh hasil estimasi model terbaik sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: PTK?
Method: Pooled Least Squares
Date: 11/02/17 Time: 14:25
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-848251.1	696856.9	-1.217253	0.2245
UMP?	-0.073980	0.019980	-3.702655	0.0003
IPM?	8141.532	10297.02	0.790669	0.4298
AK?	0.989627	0.012395	79.83997	0.0000
PDRB?	0.791981	0.049168	16.10762	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.999932	Mean dependent var	3319886.
Adjusted R-squared	0.999922	S.D. dependent var	4748803.
S.E. of regression	42049.29	Akaike info criterion	24.25974
Sum squared resid	5.02E+11	Schwarz criterion	24.78931
Log likelihood	-3956.857	Hannan-Quinn criter.	24.47098
F-statistic	93240.60	Durbin-Watson stat	1.094155
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil persamaan estimasi untuk model penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

$$\mathbf{PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 AK_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + e_{it}}$$

$$\mathbf{= - 848251.1 - 0.073980UMP + 8141.532IPM + 0.989627AK + 0.791981PDRB + e}$$

Keterangan:

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

t : Tahun yang diteliti 2007-2016

i : Provinsi

β_0	: intersept (konstanta)
β_1. β_2. β_3. β_4	: koefisien regresi masing-masing variabel
UMP	: Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
AK	: Angkatan Kerja (Jiwa)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)
e	: error

Dari tabel hasil estimasi *fixed effect* diatas dapat dilihat tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar -848251.1 jiwa dengam asumsi variabel independen (UMP, IPM, AK, dan PDRB) lainnya tidak ada.

a. Upah Minimum Provinsi naik 1 rupiah maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar -0.073980 jiwa.
b. Indeks Pembangunan Manusia naik 1 persen maka akan menaikkan penyerapan tenaga kerja sebesar 8141.532 jiwa.
c. Angkatan Kerja naik 1 jiwa maka akan menaikkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.989627 jiwa.
d. Produk Domestik Regional Bruto naik 1 milyar rupiah maka akan menaikkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.791981 jiwa.

4.1.3 Uji Hipotesis

4.1.3.1 Uji t (Pengujian Hasil Individu)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikasi atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

1. **Pengujian Terhadap Koefisien Upah Minimum Provinsi (β_1)**

   Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh upah minimum provinsi adalah -0.073980 sementara t-hitung adalah -3.702655 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0003 kurang dari α 5% (0.0003 < 0.05) sehingga secara statistik variabel upah minimum provinsi (X1) signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Y) dimana Ho ditolak dan menerima Ha maka model estimasi *fixed effect* variabel upah minimum provinsi (X1) berpengaruh negatif penyerapan tenaga kerja (Y).

2. **Pengujian Terhadap Koefisien Indeks Pembangunan Manusia (β_2)**

   Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh indeks pembangunan manusia adalah 8141.532 sementara t-hitung adalah 0.790669 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.4298 lebih dari α 5% (0.4298 > 0.05)

sehingga secara statistik variabel indeks pembangunan manusia (X2) tidak signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Y) dimana Ho diterima dan menolak Ha maka model estimasi *fixed effect* variabel indeks pembangunan manusia (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

3. Pengujian Terhadap Koefisien Angkatan Kerja (β_3)

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh angkatan kerja adalah 0.989627 sementara t-hitung adalah 79.83997 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0000 kurang dari α 5% (0.0000 < 0.05) sehingga secara statistik variabel angkatan kerja (X3) signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Y) dimana Ho ditolak dan menerima Ha maka model estimasi *fixed effect* variabel angkatan kerja (X3) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

4. Pengujian Terhadap Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (β_4)

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh produk domestik regional bruto adalah 0.791981 sementara t-hitung adalah 16.10762 sedangkan probabilitas yang

dihasilkan adalah 0.0000 kurang dari α 5% (0.0000 < 0.05) sehingga secara statistik variabel produk domestik regional bruto (X4) signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Y) dimana Ho ditolak dan menerima Ha maka model estimasi *fixed effect* variabel produk domestik regional bruto (X4) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

4.1.3.2 Uji F (Uji Secara Menyeluruh)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama).

F-hitung dalam perhitungan menggunakan Eviews sebesar 93240.60 dan probabilitasnya sebesar 0.000000 (kurang dari α = 5%) sehingga secara statistik model estimasi *fixed effect* variabel independen upah minimum provinsi (X1), indeks pembangunan manusia (X2), angkatan kerja (X3), dan produk domestik regional bruto (X4) secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y).

4.1.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect* menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.999932. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen upah minimum provinsi (X1), indeks pembangunan manusia (X2), angkatan kerja (X3), dan produk domestik regional bruto (X4) mampu menjelaskan variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y) sebesar 99.99%, sedangkan sisanya sebesar 0.01% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.1.4 Analisis *Cross Section Effect* (Perprovinsi)

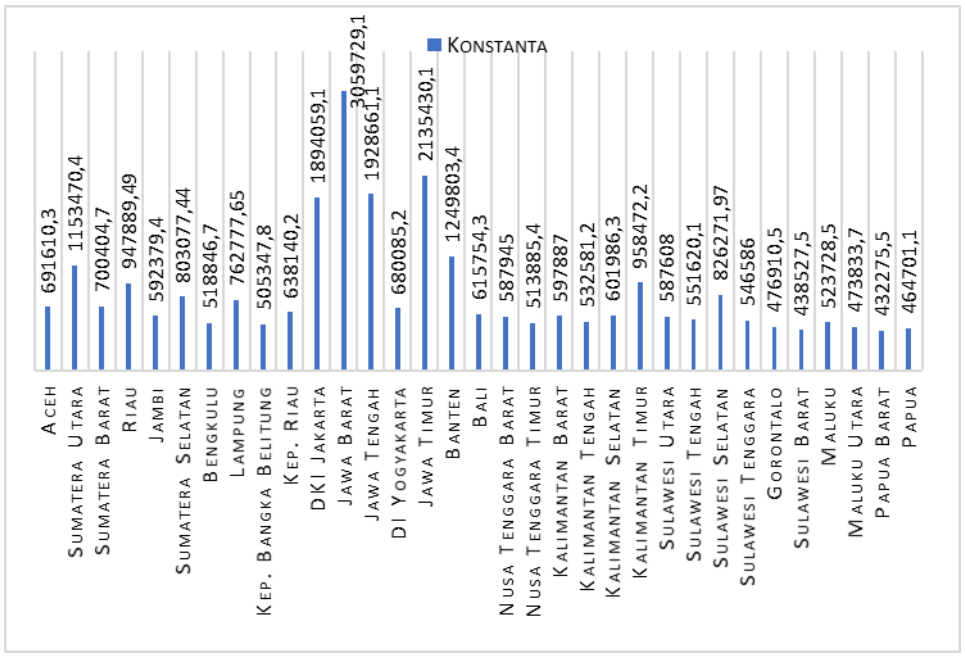

Gambar 4.1 Grafik Hasil Konstanta *Cross Section Effect*

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu berada di provinsi Jawa Barat sebesar 3059729,1. Kemudian peyerapan tertinggi setelah Jawa Barat yaitu provinsi Jawa Timur sebesar 2135430,1 dan penyerapan tenaga kerja terendah yaitu berada di provinsi Papua Barat sebesar 432275,5.

4.1.5 Analisis *Period Effect* (Pertahun)

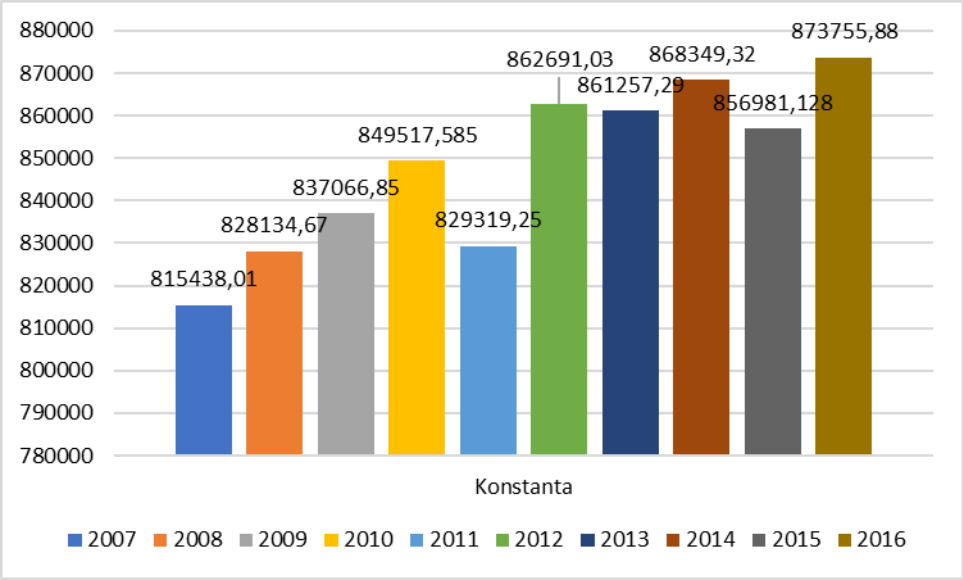

Gambar 4.2 Grafik Hasil Konstanta *Period Effect*

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja dari tahun 2007 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan yakni 815438,01 menjadi 849517,585. Akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 829319,25 dan tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi. Hingga penyerapan tenaga kerja yang tertinggi yaitu pada tahun 2016 mencapai 873755,88.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh model yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan model *fixed effect.* Dari hasil pengujian model *fixed effect* disimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikkan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2009) menyimpulkan bahwa tingkat upah riil terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati (2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa upah minimum provinsi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Utami (2009) dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa upah minimum terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980-2007.

Selanjutnya diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti ketidaksignifikan indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini diakibatkan oleh ketidakmerataan kualitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian di antar provinsi di Indonesia. Dimana dari 33 provinsi, terdapat sebanyak 9 provinsi yang memiliki IPM di atas angka nasional dan 24 provinsi yang memiliki IPM di bawah angka nasional. Idealnya adalah rasio antar banyaknya provinsi dengan IPM di atas angka nasional dengan banyaknya provinsi dengan IPM di bawah angka nasional sebesar 50:50 namun pada kenyataannya rasionya adalah sebesar 27:73, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi di antar provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati (2012) yang menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia.

Kemudian variabel angkatan kerja menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat dengan strata pendidikan yang semakin baik dari tahun ke tahun maka akan menyebabkan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan mampu meningkatkan

perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2009) yang menyimpulkan bahwa angkatan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980-2007.

Selanjutnya diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti peningkatan nilai produk domestik regional bruto menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi. Sehingga penyerapan tenaga kerja akan bertambah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2009) yang menyimpulkan bahwa produk domestik regional bruto terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Utami (2009) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa produk domestik regional bruto terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980-2007. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indradewa (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa produk domestik regional bruto terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel-variabel yang meliputi upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2016 dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikkan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan.

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti ketidaksignifikan indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini diakibatkan oleh ketidakmerataan kualitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian di antar provinsi di Indonesia. Dimana dari 33 provinsi, terdapat sebanyak 9 provinsi yang memiliki IPM di atas angka nasional dan 24 provinsi yang memiliki IPM di bawah angka nasional. Idealnya adalah rasio antar banyaknya provinsi dengan IPM di atas angka nasional dengan banyaknya provinsi dengan IPM di bawah angka nasional sebesar 50:50 namun pada kenyataannya rasionya adalah sebesar 27:73, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi di antar provinsi di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat dengan strata pendidikan yang semakin baik dari tahun ke tahun maka akan menyebabkan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan mampu meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat.
4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti peningkatan nilai produk domestik regional bruto

menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi. Sehingga penyerapan tenaga kerja akan bertambah.

5.2 Implikasi

1. Upah minimum provinsi seharusnya disesuaikan dengan keadaan daerahnya, sehingga penetapan upah minimum provinsi tidak hanya menguntungkan tenaga kerja saja maupun menguntungkan pengusaha saja namun juga dapat memberikan keuntungan bersama. Upah minimum provinsi yang terlalu rendah akan menyengsarakan tenaga kerja namun sebaliknya upah minimum provinsi yang terlalu besar juga akan mematikan pengusaha sehingga harus ada regulasi serta kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi sehingga tidak hanya melihat satu sisi saja. Selain itu adanya kebijakan upah minimum provinsi harus disesuaikan dengan tingkat produktivitas dari tenaga kerja, dimana peningkatan upah minimum provinsi harus disesuikan dengan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk mengurangi resiko pengurangan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh produsen.

2. Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kebijakan wajib belajar 12 tahun agar angkatan kerja yang dihasilkan oleh Indonesia lebih baik lagi. Selain itu, pendidikan informal juga sangat penting untuk mengembangkan *softskill* yang ada dalam diri seseorang.
3. Produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan-pengembangan kegiatan ekonomi yang mendorong meningkatnya output yang dihasilkan setiap provinsi seperti kegiatan sentra industri menurut wilayah, pengembangan berbasis peningkatan wilayah, dan pembangunan menurut karakteristik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. BP STIE YKPN, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. (2007-2016). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari http://www.bps.go.id.

_____. *Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari http://www.bps.go.id.

_____. *Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari http://www.bps.go.id.

_____. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari http://www.bps.go.id.

_____. *Upah Minimum Regional/Provinsi 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari http://www.bps.go.id.

Baltagi, Badi H. (2008). *Econometrics*. Springer-Verlag, Berlin.

Bellante, Don dan Jackson, Mark. (1990). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. LP FE UI, Jakarta.

Dimas, Nenik Woyanti. (2009). *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16. No. 1. Hal. 31-41.

Feriyanto, Nur. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Indradewa, I Gusti Agung. (2013). *Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 8. No. 4. Hal. 923-950.

Simanjuntak, Payaman J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LPFE UI, Jakarta.

Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Ekonisia, Yogyakarta.

Subri, Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukirno, Sadono. (1997). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persaja, Jakarta.

Sulistiawati, Rini. (2012). *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi. Vol. 8. No. 3. Hal. 195-211.

Sumarsono, Sonny. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suroto. (1992). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Tarigan, Robinson. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Utami, Turminijanti Budi. (2009). *Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan. Vol. 1. No. 1. Nopember 2009.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA PTK, UMP, IPM, AK, dan PDRB

PROVINSI	TAHUN	PTK	UMP	IPM	AK	PDRB
Aceh	2007	1570761	850000	65,83	1742185	110379,80
Aceh	2008	1621998	1000000	66,21	1793410	104597,17
Aceh	2009	1732561	1200000	66,73	1897922	98833,54
Aceh	2010	1776254	1300000	67,09	1938519	101545,24
Aceh	2011	1790369	1350000	67,45	1967412	104874,21
Aceh	2012	1808357	1400000	67,81	1988483	108914,90
Aceh	2013	1842671	1550000	68,30	2050076	111755,83
Aceh	2014	1931823	1750000	68,81	2123312	113490,36
Aceh	2015	1966018	1900000	69,45	2182824	112661,04
Aceh	2016	2087045	2118500	70,00	2257943	116386,73
Sumatera Utara	2007	5082797	761000	65,81	5654131	278302,34
Sumatera Utara	2008	5540263	822205	66,28	6094802	296095,23
Sumatera Utara	2009	5765643	905000	66,74	6298070	311118,21
Sumatera Utara	2010	6125571	965000	67,09	6617377	331085,24
Sumatera Utara	2011	5532968	1035500	67,34	6026020	353147,59
Sumatera Utara	2012	5880885	1200000	67,74	6274874	375924,14
Sumatera Utara	2013	6081301	1375000	68,36	6500750	398727,14
Sumatera Utara	2014	5881371	1505850	68,87	6272083	419573,31
Sumatera Utara	2015	5962304	1625000	69,51	6391098	440955,85
Sumatera Utara	2016	5991229	1811875	70,00	6362909	463775,46
Sumatera Barat	2007	1889406	725000	65,84	2106711	88941,20
Sumatera Barat	2008	1956378	800000	66,50	2127512	95058,33
Sumatera Barat	2009	1998922	880000	66,94	2172002	99129,66
Sumatera Barat	2010	2041454	940000	67,25	2194040	105017,74
Sumatera Barat	2011	2051696	1055000	67,81	2230622	111679,49
Sumatera Barat	2012	2085483	1150000	68,36	2234007	118724,42
Sumatera Barat	2013	2061109	1350000	68,91	2216687	125940,63
Sumatera Barat	2014	2180336	1490000	69,36	2331993	133340,84
Sumatera Barat	2015	2184599	1615000	69,98	2346163	140704,88
Sumatera Barat	2016	2347911	1800725	70,73	2473814	148110,75
Riau	2007	1907946	710000	67,35	2115084	342767,59
Riau	2008	2055863	800000	67,77	2239385	362138,23
Riau	2009	2067357	901600	68,23	2260862	372876,31
Riau	2010	2170247	1016000	68,65	2377494	388578,23
Riau	2011	2311171	1120000	68,90	2461112	410215,84
Riau	2012	2399851	1238000	69,15	2509501	425626,00

Riau	2013	2479493	1400000	69,91	2623310	436187,51
Riau	2014	2518485	1700000	70,33	2695247	447986,78
Riau	2015	2554296	1878000	70,84	2771349	448991,96
Riau	2016	2765946	2095000	71,20	2987952	458998,09
Jambi	2007	1146861	658000	64,24	1222951	74039,36
Jambi	2008	1224483	724000	64,72	1290854	79343,21
Jambi	2009	1260592	800000	65,13	1334496	84411,22
Jambi	2010	1462405	900000	65,39	1545683	90618,41
Jambi	2011	1393554	1028000	66,14	1461213	97740,87
Jambi	2012	1436527	1142500	66,94	1484033	104615,08
Jambi	2013	1397247	1300000	67,76	1467007	111766,13
Jambi	2014	1491038	1502300	68,24	1570822	119991,44
Jambi	2015	1550403	1710000	68,89	1620752	125036,40
Jambi	2016	1624522	1906650	69,62	1692193	130499,63
Sumatera Selatan	2007	3057518	662000	63,07	3372332	167894,01
Sumatera Selatan	2008	3191355	743000	63,64	3472012	176410,95
Sumatera Selatan	2009	3196894	824730	64,14	3460365	183664,47
Sumatera Selatan	2010	3421193	927825	64,44	3665044	194012,97
Sumatera Selatan	2011	3417374	1048440	65,12	3658951	206360,70
Sumatera Selatan	2012	3582099	1195220	65,79	3796829	220459,20
Sumatera Selatan	2013	3524883	1630000	66,16	3704132	232175,05
Sumatera Selatan	2014	3692806	1825000	66,75	3885674	243297,77
Sumatera Selatan	2015	3695866	1974346	67,46	3934787	254044,88
Sumatera Selatan	2016	3998637	2206000	68,24	4178794	266815,41
Bengkulu	2007	767107	644838	64,14	804788	23925,01
Bengkulu	2008	770642	690000	64,65	810361	25300,08
Bengkulu	2009	787308	735000	65,02	829449	26721,31
Bengkulu	2010	815741	780000	65,35	855026	28352,57
Bengkulu	2011	837674	815000	65,96	867699	30295,05
Bengkulu	2012	853784	930000	66,61	885815	32363,04
Bengkulu	2013	832048	1200000	67,50	872233	34326,37
Bengkulu	2014	868794	1350000	68,06	900054	36207,15
Bengkulu	2015	904317	1500000	68,59	951007	38066,01
Bengkulu	2016	964971	1605000	69,33	997913	40082,87
Lampung	2007	3281351	555000	62,25	3550483	128225,66
Lampung	2008	3313553	617000	62,71	3568770	135082,14

Lampung	2009	3387175	691000	63,27	3627155	142193,09
Lampung	2010	3737078	767500	63,71	3957697	150560,84
Lampung	2011	3368486	855000	64,20	3598090	160437,50
Lampung	2012	3516856	975000	64,87	3709599	170769,21
Lampung	2013	3471602	1150000	65,73	3681084	180620,01
Lampung	2014	3673158	1399037	66,42	3857936	189797,49
Lampung	2015	3635258	1581000	66,95	3832108	199536,10
Lampung	2016	3931321	1763000	67,65	4121668	209807,19
Kep. Bangka Belitung	2007	475006	720000	64,90	507962	30921,33
Kep. Bangka Belitung	2008	492949	813000	65,41	524370	32343,76
Kep. Bangka Belitung	2009	506284	850000	65,74	539410	33553,17
Kep. Bangka Belitung	2010	585136	910000	66,02	620063	35561,90
Kep. Bangka Belitung	2011	555258	1024000	66,59	577539	38013,99
Kep. Bangka Belitung	2012	585493	1110000	67,21	606298	40104,91
Kep. Bangka Belitung	2013	597613	1265000	67,92	620270	42190,86
Kep. Bangka Belitung	2014	604223	1640000	68,27	636959	44159,44
Kep. Bangka Belitung	2015	623949	2100000	69,05	665842	45961,46
Kep. Bangka Belitung	2016	686830	2341500	69,55	705173	47852,69
Kep. Riau	2007	535797	805000	69,81	588874	93996,76
Kep. Riau	2008	612667	833000	70,29	666000	100227,11
Kep. Riau	2009	626456	892000	70,63	681769	103758,29
Kep. Riau	2010	769486	925000	71,13	826535	111223,67
Kep. Riau	2011	763349	975000	71,61	806711	118961,42
Kep. Riau	2012	801510	1015000	72,36	844409	128034,97
Kep. Riau	2013	806073	1365087	73,02	854150	137263,85
Kep. Riau	2014	819656	1665000	73,40	878415	146325,23
Kep. Riau	2015	836670	1954000	73,75	891988	155112,88
Kep. Riau	2016	859813	2178710	73,99	931435	162922,50
DKI Jakarta	2007	3842944	900560	75,32	4395324	904916,30
DKI Jakarta	2008	4191966	972604	75,75	4772477	961314,40
DKI Jakarta	2009	4118390	1069865	76,07	4687727	1009543,02
DKI Jakarta	2010	4689761	1118009	76,31	5272604	1075183,48
DKI Jakarta	2011	4528589	1290000	76,98	5128104	1147558,23
DKI Jakarta	2012	4823858	1529150	77,53	5339994	1222527,92
DKI Jakarta	2013	4668239	2200000	78,08	5108943	1296694,57
DKI Jakarta	2014	4634369	2441000	78,39	5063479	1373389,13

DKI Jakarta	2015	4724029	2700000	78,99	5092219	1454345,82
DKI Jakarta	2016	4861832	3100000	79,60	5178839	1539376,65
Jawa Barat	2007	15853822	516840	64,70	18240036	771499,09
Jawa Barat	2008	16480395	568193	65,08	18743979	819406,18
Jawa Barat	2009	16901430	628191	65,56	18981260	853733,35
Jawa Barat	2010	16942444	671500	66,15	18893835	906685,76
Jawa Barat	2011	17407516	732000	66,67	19334053	965622,06
Jawa Barat	2012	18615753	780000	67,32	20474894	1028409,74
Jawa Barat	2013	18731943	850000	68,25	20620610	1093543,55
Jawa Barat	2014	19230943	1000000	68,80	21006139	1149216,06
Jawa Barat	2015	18791482	1000000	69,50	20586356	1207083,41
Jawa Barat	2016	19202038	1312355	70,05	21075899	1275546,48
Jawa Tengah	2007	16304058	500000	64,65	17664277	530294,90
Jawa Tengah	2008	15463658	547000	65,27	16690966	560038,26
Jawa Tengah	2009	15835382	575000	65,72	17087649	588830,90
Jawa Tengah	2010	15809447	660000	66,08	16856330	623224,62
Jawa Tengah	2011	15822765	675000	66,64	17026107	656268,13
Jawa Tengah	2012	16531395	765000	67,21	17513488	691343,12
Jawa Tengah	2013	16469960	830000	68,02	17524022	726655,12
Jawa Tengah	2014	16550682	910000	68,78	17547026	764959,15
Jawa Tengah	2015	16435142	910000	69,49	17298925	806775,36
Jawa Tengah	2016	16511136	1265000	69,98	17312466	849383,56
DI Yogyakarta	2007	1774245	500000	73,76	1889445	56219,06
DI Yogyakarta	2008	1892205	586000	74,48	1999734	59049,66
DI Yogyakarta	2009	1895648	700000	74,83	2016694	61667,60
DI Yogyakarta	2010	1775148	745694	75,37	1882296	64678,97
DI Yogyakarta	2011	1839824	808000	75,93	1924318	68049,87
DI Yogyakarta	2012	1906145	892660	76,15	1983542	71702,45
DI Yogyakarta	2013	1886071	947114	76,44	1949243	75627,45
DI Yogyakarta	2014	1956043	988500	76,81	2023461	79536,08
DI Yogyakarta	2015	1891218	988500	77,59	1971463	83474,44
DI Yogyakarta	2016	2042400	1237700	78,38	2099436	87687,93
Jawa Timur	2007	18751421	448500	63,68	20117924	834716,49
Jawa Timur	2008	18882277	500000	64,23	20178590	884307,79
Jawa Timur	2009	19305056	570000	64,85	20338568	928655,00
Jawa Timur	2010	18698108	630000	65,36	19527051	990648,84
Jawa Timur	2011	18463606	705000	66,06	19513939	1054401,77
Jawa Timur	2012	19338902	745000	66,74	20167517	1124464,64
Jawa Timur	2013	19553910	866250	67,55	20432453	1192789,80
Jawa Timur	2014	19306508	1000000	68,14	20149998	1262684,50
Jawa Timur	2015	19367777	1000000	68,95	20274681	1331394,99
Jawa Timur	2016	19114563	1273490	69,74	19953846	1405236,11
Banten	2007	3383661	746500	66,40	4016423	230991,51
Banten	2008	3668895	837000	66,79	4325455	244330,14
Banten	2009	3704778	917500	67,14	4357240	255835,46
Banten	2010	4583085	955300	67,54	5309462	271465,28

Banten	2011	4376110	1000000	68,22	5072921	290545,84
Banten	2012	4662368	1042000	68,92	5177151	310385,59
Banten	2013	4687626	1170000	69,47	5181796	331099,11
Banten	2014	4853992	1325000	69,89	5338045	349351,23
Banten	2015	4825460	1600000	70,27	5334843	368216,55
Banten	2016	5088497	1784000	70,96	5587093	387595,37
Bali	2007	1982134	622000	68,40	2059711	79361,60
Bali	2008	2029730	682650	68,84	2099278	84102,02
Bali	2009	2057118	760000	69,36	2123588	88583,36
Bali	2010	2177358	829316	70,10	2246149	93749,35
Bali	2011	2159158	890000	70,87	2224874	99991,63
Bali	2012	2252475	967500	71,62	2300705	106951,46
Bali	2013	2242076	1181000	72,09	2283896	114103,58
Bali	2014	2272632	1542600	72,48	2316758	121787,57
Bali	2015	2324805	1621172	73,27	2372015	129130,59
Bali	2016	2416555	1807600	73,65	2463039	137192,52
Nusa Tenggara Barat	2007	1951182	645000	59,76	2086446	57185,02
Nusa Tenggara Barat	2008	1904781	730000	60,15	2029081	58800,32
Nusa Tenggara Barat	2009	1967380	832500	60,65	2098638	65936,75
Nusa Tenggara Barat	2010	2132933	890775	61,16	2252076	70122,73
Nusa Tenggara Barat	2011	1974093	950000	62,14	2083445	67379,14
Nusa Tenggara Barat	2012	2015699	1000000	62,98	2126849	66340,81
Nusa Tenggara Barat	2013	2032282	1100000	63,76	2146002	69766,71
Nusa Tenggara Barat	2014	2094100	1210000	64,31	2221810	73372,96
Nusa Tenggara Barat	2015	2127503	1330000	65,19	2255879	89344,58
Nusa Tenggara Barat	2016	2367310	1482950	65,81	2464331	94548,21
Nusa Tenggara Timur	2007	2009643	600000	57,54	2087368	38099,96
Nusa Tenggara Timur	2008	2086105	650000	58,23	2166919	39942,93
Nusa Tenggara Timur	2009	2160733	725000	58,63	2250128	41658,20
Nusa Tenggara Timur	2010	2061229	800000	59,21	2132381	43846,61
Nusa Tenggara Timur	2011	2032237	850000	60,24	2097545	46334,13

Nusa Tenggara Timur	2012	2120249	925000	60,81	2186713	48863,19
Nusa Tenggara Timur	2013	2104507	1010000	61,68	2175171	51505,19
Nusa Tenggara Timur	2014	2174228	1150000	62,26	2247438	54107,97
Nusa Tenggara Timur	2015	2219291	1250000	62,67	2307737	56831,92
Nusa Tenggara Timur	2016	2277068	1425000	63,13	2353648	59775,70
Kalimantan Barat	2007	2005027	560000	60,52	2143823	73838,01
Kalimantan Barat	2008	2040767	645000	61,09	2157549	77864,96
Kalimantan Barat	2009	2081211	705000	61,65	2200895	81605,38
Kalimantan Barat	2010	2095705	741000	61,97	2197325	86065,85
Kalimantan Barat	2011	2158251	802500	62,35	2262339	90797,59
Kalimantan Barat	2012	2196455	900000	63,41	2276975	96161,93
Kalimantan Barat	2013	2172337	1060000	64,30	2262732	101980,34
Kalimantan Barat	2014	2226510	1380000	64,89	2320229	107114,96
Kalimantan Barat	2015	2235887	1560000	65,59	2357224	112324,86
Kalimantan Barat	2016	2287823	1739400	65,88	2388758	118184,63
Kalimantan Tengah	2007	966010	665973	64,94	1018025	47359,02
Kalimantan Tengah	2008	982198	765868	65,29	1029445	50280,77
Kalimantan Tengah	2009	998967	873089	65,71	1047402	53080,41
Kalimantan Tengah	2010	1022580	986590	65,96	1066733	56531,02
Kalimantan Tengah	2011	1079036	1134580	66,38	1118644	60492,93
Kalimantan Tengah	2012	1112252	1327459	66,66	1148275	64649,17
Kalimantan Tengah	2013	1124017	1553127	67,41	1158834	69410,99
Kalimantan Tengah	2014	1154489	1723970	67,77	1193171	73724,52

Kalimantan Tengah	2015	1214681	1896367	68,53	1272461	78890,97
Kalimantan Tengah	2016	1248189	2057528	69,13	1311427	83909,49
Kalimantan Selatan	2007	1598981	745000	63,42	1730916	72087,04
Kalimantan Selatan	2008	1670139	825000	64,08	1780220	76733,36
Kalimantan Selatan	2009	1705905	930000	64,62	1821717	80789,40
Kalimantan Selatan	2010	1743622	1024500	65,20	1840296	85305,00
Kalimantan Selatan	2011	1776088	1126000	65,89	1895277	91252,13
Kalimantan Selatan	2012	1833892	1225000	66,68	1934310	96697,84
Kalimantan Selatan	2013	1830813	1337500	67,17	1900350	101850,54
Kalimantan Selatan	2014	1867462	1620000	67,63	1941229	106779,40
Kalimantan Selatan	2015	1889502	1870000	68,38	1987250	110867,88
Kalimantan Selatan	2016	1965088	2085050	69,05	2078384	115727,55
Kalimantan Timur	2007	1091625	766500	69,62	1241421	370843,12
Kalimantan Timur	2008	1259587	889654	70,33	1416963	389012,76
Kalimantan Timur	2009	1302772	955000	70,89	1460996	397900,91
Kalimantan Timur	2010	1481898	1002000	71,31	1648455	418211,58
Kalimantan Timur	2011	1521316	1084000	72,02	1717703	445264,42
Kalimantan Timur	2012	1607526	1177000	72,62	1766900	469646,25
Kalimantan Timur	2013	1603915	1752073	73,21	1742380	438532,91
Kalimantan Timur	2014	1677466	1886315	73,82	1811129	446029,05
Kalimantan Timur	2015	1423957	2026126	74,17	1539491	440647,70
Kalimantan Timur	2016	1581239	2161253	74,59	1717892	438977,04
Sulawesi Utara	2007	908503	750000	66,57	1036499	40371,85
Sulawesi Utara	2008	912198	845000	67,00	1020952	44756,17

Sulawesi Utara	2009	940173	929500	67,46	1051130	48267,39
Sulawesi Utara	2010	936939	1000000	67,83	1036574	51721,33
Sulawesi Utara	2011	953546	1050000	68,31	1060730	54910,90
Sulawesi Utara	2012	973035	1250000	69,04	1057416	58677,59
Sulawesi Utara	2013	965457	1550000	69,49	1035772	62422,50
Sulawesi Utara	2014	980756	1900000	69,96	1060752	66360,76
Sulawesi Utara	2015	1000032	2150000	70,39	1099272	70425,14
Sulawesi Utara	2016	1110564	2400000	71,05	1183721	74771,07
Sulawesi Tengah	2007	1083944	615000	61,69	1183163	40995,86
Sulawesi Tengah	2008	1131706	670000	62,36	1196988	44185,65
Sulawesi Tengah	2009	1149718	720000	62,90	1215727	47592,39
Sulawesi Tengah	2010	1164226	777500	63,29	1220454	51752,07
Sulawesi Tengah	2011	1211745	827500	64,27	1299834	56833,83
Sulawesi Tengah	2012	1224095	885000	65,00	1274460	62249,53
Sulawesi Tengah	2013	1239122	995000	65,79	1293332	68219,32
Sulawesi Tengah	2014	1293226	1250000	66,43	1342615	71677,53
Sulawesi Tengah	2015	1327418	1500000	66,76	1384235	82803,20
Sulawesi Tengah	2016	1459803	1670000	67,47	1509505	91070,55
Sulawesi Selatan	2007	2939463	673200	64,16	3312177	138642,10
Sulawesi Selatan	2008	3136111	740520	64,71	3447879	149434,27
Sulawesi Selatan	2009	3222256	905000	65,37	3536920	158746,71
Sulawesi Selatan	2010	3272365	1000000	66,00	3571317	171740,74
Sulawesi Selatan	2011	3326880	1100000	66,65	3621417	185708,47
Sulawesi Selatan	2012	3421101	1200000	67,26	3639821	202184,59
Sulawesi Selatan	2013	3376549	1440000	67,92	3558183	217589,13
Sulawesi Selatan	2014	3527036	1800000	68,49	3715801	233988,05
Sulawesi Selatan	2015	3485492	2000000	69,15	3706128	250758,28
Sulawesi Selatan	2016	3694712	2250000	69,76	3881003	269338,55
Sulawesi Tenggara	2007	894601	640000	64,41	955763	38756,62
Sulawesi Tenggara	2008	923118	700000	65,05	979256	41576,09
Sulawesi Tenggara	2009	950876	770000	65,54	998195	44724,19
Sulawesi Tenggara	2010	997678	860000	65,99	1045899	48401,15
Sulawesi Tenggara	2011	954981	930000	66,52	1001983	53546,69
Sulawesi Tenggara	2012	994521	1032300	67,07	1037479	59785,40
Sulawesi Tenggara	2013	997231	1125207	67,55	1042947	64268,71
Sulawesi Tenggara	2014	1037419	1400000	68,07	1085509	68291,78
Sulawesi Tenggara	2015	1074916	1652000	68,75	1138045	72991,33

Sulawesi Tenggara	2016	1219548	1850000	69,31	1253624	77739,55
Gorontalo	2007	362676	560000	61,36	390649	12408,30
Gorontalo	2008	405126	600000	61,77	429384	13370,83
Gorontalo	2009	420962	675000	62,21	447313	14379,02
Gorontalo	2010	432926	710000	62,65	456499	15475,74
Gorontalo	2011	445242	762500	63,48	477420	16669,09
Gorontalo	2012	455322	837500	64,16	476634	17987,07
Gorontalo	2013	458930	1175000	64,70	478813	19367,57
Gorontalo	2014	479137	1325000	65,17	500056	20775,80
Gorontalo	2015	493687	1600000	65,86	517788	22068,59
Gorontalo	2016	546668	1875000	66,29	562196	23507,15
Sulawesi Barat	2007	444863	691464	58,09	470497	12924,37
Sulawesi Barat	2008	473309	760500	58,80	495959	14484,52
Sulawesi Barat	2009	488080	909400	59,35	511144	15357,39
Sulawesi Barat	2010	514867	944200	59,74	532171	17183,83
Sulawesi Barat	2011	537148	1006000	60,63	555775	19027,50
Sulawesi Barat	2012	572081	1127000	61,01	584694	20786,89
Sulawesi Barat	2013	545438	1165000	61,53	558574	22227,39
Sulawesi Barat	2014	595797	1400000	62,24	608446	24195,65
Sulawesi Barat	2015	595905	1655500	62,96	616549	25983,65
Sulawesi Barat	2016	624182	1864000	63,60	645671	27550,26
Maluku	2007	485308	635000	62,96	552729	15750,22
Maluku	2008	499555	700000	63,33	559239	16416,89
Maluku	2009	533015	775000	63,86	596030	17309,27
Maluku	2010	586430	840000	64,27	651339	18428,58
Maluku	2011	618899	900000	64,75	693932	19597,39
Maluku	2012	613357	975000	65,43	664607	21000,08
Maluku	2013	602429	1275000	66,09	668721	22100,94
Maluku	2014	601651	1415000	66,74	672304	23567,73
Maluku	2015	655063	1650000	67,05	727259	24859,06
Maluku	2016	690786	1775000	67,60	743149	26291,19
Maluku Utara	2007	372339	660000	61,69	396322	12345,76
Maluku Utara	2008	394557	700000	62,02	421880	13085,82
Maluku Utara	2009	393834	770000	62,43	422398	13880,18
Maluku Utara	2010	411361	847000	62,79	437758	14983,91
Maluku Utara	2011	426466	889350	63,19	450539	16002,45
Maluku Utara	2012	450184	960498	63,93	472998	17120,07
Maluku Utara	2013	454978	1200622	64,78	472965	18208,74
Maluku Utara	2014	456017	1440746	65,18	481504	19208,76
Maluku Utara	2015	482543	1577617	65,91	513601	20381,03
Maluku Utara	2016	503479	1681266	66,63	524526	21556,32
Papua Barat	2007	268117	987000	57,99	296146	26219,82
Papua Barat	2008	316193	1105500	58,57	342382	28275,29
Papua Barat	2009	325759	1180000	59,11	352385	32196,34
Papua Barat	2010	316547	1210000	59,60	342888	41361,67

Papua Barat	2011	331124	1410000	59,90	355011	42867,19
Papua Barat	2012	347559	1450000	60,30	367493	44423,34
Papua Barat	2013	359527	1720000	60,91	376081	47694,23
Papua Barat	2014	378436	1870000	61,28	398424	50259,91
Papua Barat	2015	380226	2015000	61,73	413635	52346,49
Papua Barat	2016	402360	2237000	62,21	434817	54711,28
Papua	2007	941100	987000	53,17	990774	94979,54
Papua	2008	1028023	1105500	53,66	1075214	93651,54
Papua	2009	1082028	1216100	54,11	1128036	114460,66
Papua	2010	1456545	1316500	54,45	1510176	110808,18
Papua	2011	1449790	1403000	55,01	1526422	106066,72
Papua	2012	1485799	1585000	55,55	1542971	107890,94
Papua	2013	1559675	1710000	56,25	1610484	117118,82
Papua	2014	1617437	2040000	56,75	1675113	121391,23
Papua	2015	1672480	2193000	57,25	1741945	130459,91
Papua	2016	1664485	2435000	58,05	1722162	142476,35

Keterangan:

PTK : Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

UMP : Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (Persen)

AK : Angkatan Kerja (Jiwa)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)

Lampiran 2

COMMON EFFECT

Dependent Variable: PTK?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/30/17 Time: 19:16
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54220.85	148475.4	0.365184	0.7152
UMP?	0.052339	0.020940	2.499437	0.0129
IPM?	-1578.526	2294.907	-0.687839	0.4920
AK?	0.933223	0.003308	282.0735	0.0000
PDRB?	-0.088024	0.055809	-1.577242	0.1157

R-squared	0.998905	Mean dependent var	3319886.
Adjusted R-squared	0.998892	S.D. dependent var	4748803.
S.E. of regression	158099.3	Akaike info criterion	26.79487
Sum squared resid	8.12E+12	Schwarz criterion	26.85243
Log likelihood	-4416.154	Hannan-Quinn criter.	26.81783
F-statistic	74125.62	Durbin-Watson stat	0.092503
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3

FIXED EFFECT

Dependent Variable: PTK?
Method: Pooled Least Squares
Date: 11/02/17 Time: 14:25
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-848251.1	696856.9	-1.217253	0.2245
UMP?	-0.073980	0.019980	-3.702655	0.0003
IPM?	8141.532	10297.02	0.790669	0.4298
AK?	0.989627	0.012395	79.83997	0.0000
PDRB?	0.791981	0.049168	16.10762	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	156640.8			
_SUMATERAUTARA--C	-305219.3			
_SUMATERABARAT--C	147846.4			
_RIAU--C	-99638.39			
_JAMBI--C	255871.7			
_SUMATERASELATAN--C	45173.66			
_BENGKULU--C	329404.4			
_LAMPUNG--C	85473.45			
_KEPBANGKABELITUNG--C	342903.3			
_KEPRIAU--C	210110.9			
_DKIJAKARTA--C	-1045808.			
_JAWABARAT--C	-2211478.			
_JAWATENGAH--C	-1080410.			
_DIYOGYAKARTA--C	168165.9			
_JAWATIMUR--C	-1287179.			
_BANTEN--C	-401552.3			
_BALI--C	232496.8			
_NUSATENGGARABARAT--C	260306.1			
_NUSATENGGARATIMUR--C	334365.7			
_KALIMANTANBARAT--C	250364.1			
_KALIMANTANTENGAH--C	315669.9			
_KALIMANTANSELATAN--C	246264.8			
_KALIMANTANTIMUR--C	-110221.1			
_SULAWESIUTARA--C	260643.1			
_SULAWESITENGAH--C	296631.0			
_SULAWESISELATAN--C	21979.13			

_SULAWESITENGGARA--C	301665.1
_GORONTALO--C	371340.6
_SULAWESIBARAT--C	409723.6
_MALUKU--C	324522.6
_MALUKUUTARA--C	374417.4
_PAPUABARAT--C	415975.6
_PAPUA--C	383550.0
Fixed Effects (Period)	
2007--C	-32813.09
2008--C	-20116.43
2009--C	-11184.25
2010--C	1266.485
2011--C	-18931.85
2012--C	14439.93
2013--C	13006.19
2014--C	20098.22
2015--C	8730.028
2016--C	25504.78

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.999932	Mean dependent var	3319886.
Adjusted R-squared	0.999922	S.D. dependent var	4748803.
S.E. of regression	42049.29	Akaike info criterion	24.25974
Sum squared resid	5.02E+11	Schwarz criterion	24.78931
Log likelihood	-3956.857	Hannan-Quinn criter.	24.47098
F-statistic	93240.60	Durbin-Watson stat	1.094155
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4

RANDOM EFFECT

Dependent Variable: PTK?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/30/17 Time: 19:21
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 330
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1024838.	197542.0	-5.187947	0.0000
UMP?	-0.035842	0.012346	-2.903030	0.0039
IPM?	14608.07	3170.810	4.607047	0.0000
AK?	0.907836	0.005328	170.3916	0.0000
PDRB?	0.763368	0.046599	16.38174	0.0000

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	147171.8	0.9231
Idiosyncratic random	42488.44	0.0769

Weighted Statistics

R-squared	0.990128	Mean dependent var	301833.1
Adjusted R-squared	0.990006	S.D. dependent var	515642.9
S.E. of regression	51548.81	Sum squared resid	8.64E+11
F-statistic	8148.691	Durbin-Watson stat	0.767362
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.996712	Mean dependent var	3319886.
Sum squared resid	2.44E+13	Durbin-Watson stat	0.027164

Lampiran 5

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	131.465276	(32,293)	0.0000
Cross-section Chi-square	901.439670	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PTK?
Method: Panel Least Squares
Date: 10/30/17 Time: 19:20
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	54220.85	148475.4	0.365184	0.7152
UMP?	0.052339	0.020940	2.499437	0.0129
IPM?	-1578.526	2294.907	-0.687839	0.4920
AK?	0.933223	0.003308	282.0735	0.0000
PDRB?	-0.088024	0.055809	-1.577242	0.1157

R-squared	0.998905	Mean dependent var	3319886.
Adjusted R-squared	0.998892	S.D. dependent var	4748803.
S.E. of regression	158099.3	Akaike info criterion	26.79487
Sum squared resid	8.12E+12	Schwarz criterion	26.85243
Log likelihood	-4416.154	Hannan-Quinn criter.	26.81783
F-statistic	74125.62	Durbin-Watson stat	0.092503
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: PANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	157.386560	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
UMP?	-0.072481	-0.035842	0.000042	0.0000
IPM?	17460.671935	14608.069817	3944436.750400	0.1509
AK?	0.996544	0.907836	0.000121	0.0000
PDRB?	0.781698	0.763368	0.000268	0.2630

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: PTK?
Method: Panel Least Squares
Date: 10/30/17 Time: 19:22
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1492769.	225720.8	-6.613342	0.0000
UMP?	-0.072481	0.013937	-5.200803	0.0000
IPM?	17460.67	3741.453	4.666816	0.0000
AK?	0.996544	0.012233	81.46107	0.0000
PDRB?	0.781698	0.049392	15.82634	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999929	Mean dependent var	3319886.
Adjusted R-squared	0.999920	S.D. dependent var	4748803.
S.E. of regression	42488.44	Akaike info criterion	24.25717
Sum squared resid	5.29E+11	Schwarz criterion	24.68313
Log likelihood	-3965.434	Hannan-Quinn criter.	24.42708
F-statistic	114153.5	Durbin-Watson stat	1.188970
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7

CROSS SECTION EFFECT (PERPROVINSI)

PROVINSI	KONSTANTA
Aceh	691610,3
Sumatera Utara	1153470,4
Sumatera Barat	700404,7
Riau	947889,49
Jambi	592379,4
Sumatera Selatan	803077,44
Bengkulu	518846,7
Lampung	762777,65
Kep. Bangka Belitung	505347,8
Kep. Riau	638140,2
DKI Jakarta	1894059,1
Jawa Barat	3059729,1
Jawa Tengah	1928661,1
DI Yogyakarta	680085,2
Jawa Timur	2135430,1
Banten	1249803,4
Bali	615754,3
Nusa Tenggara Barat	587945
Nusa Tenggara Timur	513885,4
Kalimantan Barat	597887
Kalimantan Tengah	532581,2
Kalimantan Selatan	601986,3
Kalimantan Timur	958472,2
Sulawesi Utara	587608
Sulawesi Tengah	551620,1
Sulawesi Selatan	826271,97
Sulawesi Tenggara	546586
Gorontalo	476910,5
Sulawesi Barat	438527,5
Maluku	523728,5
Maluku Utara	473833,7
Papua Barat	432275,5
Papua	464701,1

Lampiran 8

PERIOD EFFECT (PERTAHUN)

TAHUN	KONSTANTA
2007	815438,01
2008	828134,67
2009	837066,85
2010	849517,585
2011	829319,25
2012	862691,03
2013	861257,29
2014	868349,32
2015	856981,128
2016	873755,88